

KLIPPING BERITA MEDIA MASSA



Kamis, 27 Desember 2018



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Koran Tempo (Halaman, 14)	Kamis, 27 Desember 2018	Pemulihan KEK Tanjung Lesung Diserahkan ke Pengelola	Pemerintah menyerahkan pemulihan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Wisata Tanjung Lesung yang rusak akibat tsunami Selat Sunda kepada pengelola. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Jababeka Group selaku pengelola kek SELUAS 1.500 Hektare tersebut sudah memiliki sistem mitigasi bencana.
2	Media Indonesia (Halaman Utama)	Kamis, 27 Desember 2018	Dua Bendungan Mengurangi Banjir di Ibukota	Penanganan terintegrasi dari hulu ke hilir tidak dapat ditunda lagi untuk menuntaskan banjir yang kerap melanda Jakarta. Presiden Joko Widodo mengutarakan hal itu saat meninjau pembangunan bendung Sukamahi dan Bendungan Ciawi di Kecamatan Megamendung.
3	Media Indonesia (Halaman, 4)	Kamis, 27 Desember 2018	Jakarta tak lagi terendam	Kota Jakarta tidak mempunyai pilihan kecuali bersinergi dengan alam yang telah menjadi warisan ibukota Indonesia ini. Kota ini dialiri 13 sungai dan 40% daratannya berada di bawah muka laut pasang.
4	Kompas (Halaman, 2)	Kamis, 27 Desember 2018	Kenali Karakter Tsunami	Tsunami yang melanda pesisir Banten dan Lampung, Sabtu, 22 Desember 2018, begitu mengejutkan. Banyak orang tak mengira Gunung Anak Krakatau itu bisa mengirim Tsunami. Warga mengenali tsunami disebabkan gempa. Padahal, tsunami vulkanik akibat letusan Gunung Krakatau pada 27 Agustus 1883 paling mematikan dalam sejarah.
5	Kompas (Halaman, 14)	Kamis, 27 Desember 2018	Lahan Masih Jadi Kendala	Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dibangun untuk mengatasi banjir di Jakarta. Namun, pembangunannya terkendala pembebasan lahan. Pemerintah mengupayakan pembebasan lahan untuk pembangunan Bendungan Ciawi dan Sukamahi segera tuntas.
6	Bisnis Indonesia (Halaman, 3)	Kamis, 27 Desember 2018	9 Proyek Dilelang Tahun Depan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana melelang sembilan proyek bendungan pada 2019, menyusul 13 proyek serupa yang dilelang tahun ini.
7	Bisnis Indonesia (Halaman, 2)	Kamis, 27 Desember 2018	Tantangan Berat Industri Pariwisata	Kinerja industri pariwisata pada tahun ini mendapat tantangan berat. Berbagai bencana alam dan tragedi bom yang terjadi di beberapa wilayah mempengaruhi secara langsung jumlah wisatawan. Kementerian pariwisata bahkan pesimistis tahun ini target kunjungan tercapai.
8	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)	Kamis, 27 Desember 2018	Berita Foto	Bendungan Sukamahi
9	Bisnis Indonesia (Halaman, 20)	Kamis, 27 Desember 2018	Pengembang Masih Menunggu Insentif	Gedung berkonsep ramah lingkungan atau green building mutlak dikembangkan sejalan dengan populasi kota yang semakin padat. Namun, konsep bangunan hijau masih belum banyak diterapkan pada pembangunan gedung tanah air.
10	Bisnis Indonesia (Halaman, 20)	Kamis, 27 Desember 2018	Jasa Marga Incar Ruas Bontang - Samarinda	PT. Jasa Marga Tbk. Siap berpartisipasi dalam tender perusahaan jalan tol Bontang-Samarinda setelah mendapat hak perusahaan tol Balikpapan-Samarinda lewat anak usahanya, PT Jasamarga Balikpapan Samarinda.

Judul	Pemulihan KEK Tanjung Lesung Diserahkan ke Pengelola	Tanggal	Kamis, 27 Desember 2018
Media	Koran Tempo (Halaman, 14)		
Resume	Pemerintah menyerahkan pemulihan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Wisata Tanjung Lesung yang rusak akibat tsunami Selat Sunda kepada pengelola. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Jababeka Group selaku pengelola kek SELUAS 1.500 Hektare tersebut sudah memiliki sistem mitigasi bencana.		

Pemulihan KEK Tanjung Lesung Diserahkan ke Pengelola

Aset yang rusak sudah diasuransikan.

Andi Ibnu

andi.ibnu@tempo.co.id

JAKARTA — Pemerintah menyerahkan pemulihan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Wisata Tanjung Lesung yang rusak akibat tsunami Selat Sunda kepada pengelola. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Jababeka Group selaku pengelola KEK seluas 1.500 hektare tersebut sudah memiliki sistem mitigasi bencana. "Sudah pasti ada asuransinya," kata dia di kantornya, kemarin.

Darmin mengatakan pengelolaan KEK oleh perusahaan swasta mesti memiliki manajemen risiko yang berlapis. Hal tersebut berbeda dengan permukiman warga yang tidak memiliki antisipasi atau pengamanan atas dampak bencana. "Yang nasibnya lebih memprihatinkan adalah perumahan dan warung-warung warga," ujar dia.

Direktur Utama Jababeka Group, Setyono Djuandi Darmono, mengatakan 2 hektare wilayah KEK Tanjung Lesung rusak karena tsunami Selat Sunda,



Prajurit TNI melakukan penyisiran untuk mencari jenazah pascabencana tsunami di tempat wisata Tanjung Lesung, Banten, Selasa lalu.

Sabtu lalu. Kerusakan mencakup Klaster Tanjung Lesung Beach Resort. Adapun bagian lain, seperti Blue Fish, Lada Bay Village, dan landasan pesawat, tidak terkena dampak tsunami. Menurut Darmono, dana yang dibutuhkan untuk membangun kembali sarana yang rusak mencapai Rp 150 miliar. Untuk memulihkan kepercayaan

investor, operator KEK ini akan bekerja sama dengan lembaga asal Jepang untuk mitigasi bencana.

Sekretaris Dewan Nasional KEK, Enoh Suharto Pranoto, mengatakan operator diberi hak pengelolaan lahan untuk diperjualbelikan. Operator boleh mengutip dana dari hasil sewa-menyewa lahan di dalam KEK. Namun,

kata dia, kewenangan tersebut dibarengi dengan risiko untuk membangun infrastruktur dasar, seperti jalan, sanitasi, dan elektrifikasi. "Aset seperti hotel pasti diasuransikan, kalau jalan sepertinya tidak," katanya.

Enoh mengatakan pemerintah selalu mencari lokasi terbaik ketika menunjuk suatu daerah menjadi KEK.

Asas rancangan tata ruang dan wilayah dan kajian risiko bencana disusun dengan melibatkan banyak pihak, seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup; Badan Pertanahan Nasional; hingga Badan Informasi Geospasial.

"Sistem peringatan dini dan pelatihan mitigasi bencana jadi tanggung jawab pemerintah," ujarnya. Meski tak ikut menanggung kerugian, Enoh mengatakan pemerintah memastikan berbagai sarana dan prasarana pendukung diperbaiki, seperti akses jalan.

Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Perekonomian, Wahyu Utomo, mengatakan pemerintah akan melakukan *hearing* khusus bersama pelaku industri di wilayah yang terkena dampak tsunami dalam waktu dekat. "Besok rencananya kami bertemu operator di sini," ujarnya.

Pengelola KEK pun memahami jika bencana menjadi risiko yang harus mereka tanggung. Direktur Utama Indonesia Tourism Development Corporation, Abdulbar Mansoer, mengatakan sempat waswas ketika bencana gempa besar terjadi di Lombok beberapa waktu lalu. Sumber gempa yang terjadi dikhawatirkan turut memporak-porandakan KEK Mandalika yang dia kelola. "Untung tidak terjadi apa-apa. Saya yakin lokasi KEK sudah ditentukan di wilayah dengan peluang bencana yang rendah," katanya.

● GABRIEL ANDAR

Judul	Dua Bendungan Mengurangi Banjir di Ibukota	Tanggal	Kamis, 27 Desember 2018
Media	Media Indonesia (Halaman Utama)		
Resume	Penanganan terintegrasi dari hulu ke hilir tidak dapat ditunda lagi untuk menuntaskan banjir yang kerap melanda Jakarta. Presiden Joko Widodo mengutarakan hal itu saat meninjau pembangunan bendunga Sukamahi dan Bendungan Ciawi di Kecamatan Megamendung.		

INFRASTRUKTUR

Dua Bendungan Mengurangi Banjir di Ibu Kota

PENANGANAN terintegrasi dari hulu ke hilir tidak dapat ditunda lagi untuk menuntaskan banjir yang kerap melanda Jakarta.

Presiden Joko Widodo mengutarakan hal itu saat meninjau pembangunan Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi di Kecamatan Megamendung, Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kemarin.

"Selain membangun bendungan di hulu, pembangunan di hilir pun tidak kalah penting. Ya, semua harus berjalan," kata Presiden yang didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

"Kita ingin menyelesaikan masalah banjir di Jakarta. Kita bekerja di hulu. Jadi, yang kita kerjakan ialah Waduk Sukamahi dan Waduk Ciawi. Hulu dan hilir semuanya harus dikerjakan. Hulunya sudah, hilirnya di Jakarta sendiri. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

akan terus mengerjakan pelebaran Kali Ciliwung," lanjut Jokowi.

Waduk Sukamahi dan Waduk Ciawi menjadi bagian dari solusi banjir di Jakarta. Kedua bendungan itu merupakan tipe kering (*dry dam*) yang di musim kemarau mengering dan baru digenangi air di musim penghujan.

Dengan daya tampung 8,13 juta meter kubik, bendungan mampu menahan aliran air permukaan dari hulu Gunung Gede dan Pangrango. Setelah menahan laju aliran air selama 4 jam, bendungan mengelontorkannya ke Sungai Ciliwung lewat terowongan.

Saat ini, debit air yang mengalir dari hulu Gunung Gede dan Pangrango ke Jakarta mencapai 56,52 meter kubik/detik pada saat hujan. Setelah bendungan berfungsi, debit air berkurang menjadi 40 meter kubik/detik.

"Nanti debit air yang mengalir



PRESIDEN TINJAU PEMBANGUNAN BENDUNGAN: Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan Bendungan Ciawi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kemarin. Pembangunan Bendungan Ciawi yang memiliki volume tampung 6,45 juta meter kubik serta Bendungan Sukamahi sebesar 1,68 juta meter kubik diharapkan dapat mencegah banjir kiriman ke Jakarta.

ke Katulampa berkurang menjadi 23% dan air yang masuk ke Jakarta berkurang hingga 30%. Jadi, kedua bendungan ini mengurangi banjir di Jakarta 30% lebih," ujar Jokowi.

Lebih lanjut Jokowi menekankan pembenahan di hulu harus diimbangi dengan di sisi hilir, yakni Jakarta. Dia menyebutkan saat ini

di sisi hilir masih menyelesaikan sodetan terowongan antara Kali Ciliwung dan Kanal Banjir Timur. "Selain itu, pelebaran Kali Ciliwung yang dilakukan Pak Gubernur DKI sangat diperlukan. Begitu juga sumur resapan dan drainase."

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengharapkan ke-

dua bendungan kelak dapat menjadi objek wisata untuk meningkatkan perekonomian warga di daerah. "Ada nilai ekonomis yang bisa diperoleh Jabar. Saya harap kedua bendungan itu segera selesai." (Dro/DD/Ant/X-3)

Judul	Jakarta tak lagi terendam	Tanggal	Kamis, 27 Desember 2018
Media	Media Indonesia (Halaman, 4)		
Resume	Kota Jakarta tidak mempunyai pilihan kecuali bersinergi dengan alam yang telah menjadi warisan ibu kota Indonesia ini. Kota ini dialiri 13 sungai dan 40% daratannya berada di bawah muka laut pasang.		

Jakarta tak lagi Terendam

Upaya Pengendalian Banjir

- Pembangunan Banjir Kanal
- Program normalisasi sungai dan saluran
- Pemilihan alat dan saluran
- Antisipasi pasang dan pembuatan tanggul
- Pembangunan pompa

Pembangunan Bendungan Ciawi dan Sukamahi

- Target selesai: 2019
- Volume tampung Bendungan Sukamahi: 1,68 juta meter kubik (56 meter kubik/detik)
- Volume tampung Bendungan Ciawi: 8,45 juta meter kubik (285 meter kubik/detik)
- Antisipasi banjir di Jakarta yang dikerjakan di hulu
- Dapat mengurangi potensi banjir sebesar 30%
- Merileki fungsi mempertahankan air menuju Jakarta

Kota Jakarta tidak mempunyai pilihan kecuali bersinergi dengan alam yang telah menjadi warisan ibu kota Indonesia ini. Kota ini dialiri 13 sungai dan 40% daratannya berada di bawah muka laut pasang. Laju penduduk Jakarta pun pesat sehingga tekanan pada alam Jakarta berdampak pada pengelolaan serta pengendalian banjir. Sinergi ini meminta semua pemangku kepentingan, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di sekitar DKI Jakarta, bekerja sama guna mengendalikan banjir di Jakarta.

Masterplan Pengendalian Banjir Jakarta

Rekapitulasi Debit Banjir Periode Ulang 50 Tahunan

Titik	Tanpa Bendungan Debit M3/Detik	Dengan Bendungan Debit M3/Detik	Selisih Debit Banjir M3/Detik	Reduksi Banjir
Bendungan Ciawi (Cipayung)	366,00	253,75	112,25	30,6%
Bendungan Sukamahi	56,52	41,05	15,47	27,4%
Tika 3	421,52	294,3	127,22	30,2%
Tika 5	486,96	363,43	123,52	25,2%
Tika 7	563,11	427,84	135,26	24,0%
Bendung Katulampa	563,11	427,84	135,26	24,0%
Piru Ai Depok	576,58	487,79	88,79	15,3%
Piru Ai Manggala	666,03	677,05	11,02	1,9%

Reduksi puncak banjir di PM Manggala dengan dibangunnya Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi ialah 577,05 m3/det (11,9%).

Progres Fisik dan Keuangan per 26 Desember 2018

Progres Fisik

Realisasi: **9,22%**

Rencana: **17,44%**

Progres Keuangan

Realisasi: **Rp163 miliar**

Rencana: **Rp139 miliar**

Kontrak: **Rp798,3 miliar**

Permasalahan Pembebasan Tanah Bendungan Ciawi

No	Permasalahan	Keterangan
1	Tumpang Tindih Sertifikat di Lokasi Outlet Kondul	- Pengumuman peta bidang dan nominal Februari 2018 - Terdapat overlap sertifikat 15 bidang dengan alas hak sertifikat dengan 1 bidang dengan alas hak sertifikat tumpang tindih. - Pembebasan dengan perbaikan sertifikat oleh BPN dengan dasar kesepakatan kedua belah pihak yang telah ditandatangani dan luas bidang sesuai dengan daftar nominal. - Sertifikat perbaikan telah terbit pada Agustus 2018, tetapi terdapat perbedaan luas dengan nominal. - Dilakukan perbaikan nominal oleh BPN menyesuaikan dengan luas sertifikat. - Perbaikan nilai penilaian dan review ulang BPKP. - Proses pembayaran di Pusband -> UGR 20 Desember 2018.
2	Bengkak Kepentingan dan gugatan pengadilan di lokasi Inlet Kondul	- Pengumuman Peta Bidang dan Nominal Mei 2017 - Terdapat 3 Bidang dengan alas hak sertifikat (sejak setelah penetapan lokasi) - Adanya gugatan kepentingan dan perolehan sertifikat telah dilakukan di PN Kab Bogor pada Mei 2018 - Permohonan Konsinyasi 10 Desember 2018 - LMAN belum ada mekanisme pasti dalam pembayaran konsinyasi
3	Tumpang Tindih Sertifikat dengan Girik di Lokasi Area Inlet Kondul	- Terdapat overlap alas hak girik sebanyak 5 bidang dengan sertifikat yang tidak diketahui kepemilikannya. - Peta bidang belum diumumkan, BPN menunggu penyelesaian sengketa kepemilikan - Terdapat keambiguan penentuan sertifikat yang berada di desa lain, dilakukan penghapusan sertifikat. - Bidang akan diumumkan dengan 20 bidang sisa Cipayung
4	Inventarisasi Ulang Salpas B untuk Bangunan di Lokasi Area Inlet Kondul	- Pengumuman peta bidang dan nominal sejak Mei 2017 - 10 Bidang dilakukan inventarisasi ulang untuk bangunan vila - Menupakan lokasi jalur kondul - Perbaikan nominal sejak Juli 2018 belum diberikan BPN untuk ditandatangani - perubahan nilai appraisal dan review ulang BPKP. - Dalam penyusunan perbaikan data nominal selanjutnya diujikan review BPKP.
5	Tumpang Tindih Sertifikat di Lokasi Salting Plan	- Pengumuman peta bidang dan nominal Februari 2018 - 2 bidang overlap sertifikat. - Pembebasan dengan perbaikan sertifikat oleh BPN dengan dasar kesepakatan kedua belah pihak yang telah ditandatangani dan luas bidang sesuai dengan daftar nominal. - Sertifikat perbaikan telah terbit pada Agustus 2018, tapi terdapat perbedaan luas dengan nominal. - Dilakukan perbaikan nominal oleh BPN, disesuaikan dengan luas sertifikat. - Perbaikan nilai appraisal dan review ulang BPKP.

Progres Pengadaan Tanah Bendungan Ciawi (Cipayung)

Desa Cipayung

- 292 bidang
- 273 pengumuman
- 238 dibayar
- 34 perbaikan
- 19 belum diumumkan

Desa Gading

- 505 bidang
- 505 pengumuman
- 420 perbaikan
- 85 proses pembayaran

Data Teknis Bendungan Ciawi

Desa Kopo

- 97 bidang
- 97 pengumuman
- 97 perbaikan

Desa Sukakarya

- 46 bidang
- 46 proses pengumuman

KETERANGAN:
 AREA KONSTRUKSI: 18.40 Ha
 AREA OPERASIONAL: 18.02 Ha
 AREA GREEN BELT: 18.10 Ha
 TOTAL: 54,52 Ha

PROGRES PEMBEBASAN LAHAN TAHUN 2018 (26 DESEMBER 2018)
 NEGOTIASI: 0,13 NOVEMBER 2018
 DESA CIPAYUNG: 18 BIDANG
 DESA GADING: 8 BIDANG

Asa Genangan
 Elevasi muka air banjir: +556,17
 Luas genangan maksimum: 39,52 hektare
 Volume tanggungan banjir maksimum: 8.456.000 m³
 QPMF: 1.249,96 m³/detik (inflow)
 QPMF: 1.227,56 m³/detik (outflow)

Judul	Kenali Karakter Tsunami	Tanggal	Kamis, 27 Desember 2018
Media	Kompas (Halaman, 2)		
Resume	Tsunami yang melanda pesisir Banten dan Lampung, Sabtu, 22 Desember 2018, begitu mengejutkan. Banyak orang tak mengira Gunung Anak Krakatau itu bisa mengirim Tsunami. Warga mengenali tsunami disebabkan gempa. Padahal, tsunami vulkanik akibat letusan Gunung Krakatau pada 27 Agustus 1883 paling mematikan dalam sejarah.		

Kenali Karakter Tsunami

Tsunami memiliki sumber dan karakteristik yang beragam. Tidak semua tsunami didahului gempa bumi dan laut yang surut. Dengan mengenali karakteristik tsunami, kita bisa selamat darinya.

Ahmad Arif

Tsunami yang melanda pesisir Banten dan Lampung, Sabtu, 22 Desember 2018, begitu mengejutkan. Banyak orang tak mengira Gunung Anak Krakatau itu bisa mengirim tsunami. Warga mengenali tsunami disebabkan gempa.

Padahal, tsunami vulkanik akibat letusan Gunung Krakatau pada 27 Agustus 1883 paling mematikan dalam sejarah. Sebanyak 36.417 orang meninggal saat itu. Tinggi tsunami di pesisir barat Jawa seperti di Merak lebih dari 25 meter, di Teluk Betung gelombang mencapai 15 meter, bahkan di beberapa tempat mencapai 35 meter.

Bongkahan koral sebesar 600 ton yang terangkat dari dasar laut dan didamparkan di Pantai Aryer, Banten, hanya satu bukti jejak kedahsyatannya. Catatan kolonial menyebut tsunami itu juga mendamparkan Kapal Uap De Berouw, yang memiliki ukuran 18 meter x 4 meter, hingga 3,3 kilometer ke daratan. Lokasi terdamparnya kapal itu kini menjadi Kampung Berouw. Kelurahan Negeri Olok Gading, Teluk Betung, Bandar Lampung.

Selain Krakatau, menurut catatan Ketua Ahli Tsunami Indonesia Gegar Prasetya, ada 18 gunung api di Indonesia bisa memicu tsunami jika meletus, yakni Tambora di Sumbawa saat meletus pada 1815 dan Banda Api di Laut Banda. Beberapa gunung lain di antaranya Rokatenda di Pulau Flores, meletus 1928, Pulau Ruang pada 1889, Pulau Awu pada 1856 dan 1892, Pulau Gamkonora pada 1673, dan Pulau Galamala pada 1871. Selain itu, gunung api bawah laut sekitar Pulau Weh mengirim tsunami sampai Banda Aceh.

Sejumlah tsunami yang melanda negeri ini menunjukkan kedahsyatan tsunami merusak apa pun. Gelombang tsunami seperti ratusan lokomotif kereta saling mendorong ke depan.

Di laut dalam, tsunami setinggi 10 sentimeter hingga beberapa meter, tetapi kecepatannya 600 kilometer per jam dan panjang gelombang mencapai ratusan kilometer. Karena sifat gelombang panjang, energi tsunami terdistribusikan dari dasar ke permukaan laut. Saat mendekati pantai, panjang gelombang memendek, kecepatannya turun sampai 30 kilometer per jam, dan energi jadi gelombang tinggi kuat menjangkau ke daratan (Sugawara D, dkk, 2008).

Ketinggian gelombang tsunami dipengaruhi panjang gelombangnya. Adapun panjang gelombang tsunami dipengaruhi lebar bidang runtuhan.

Setelah tsunami Aceh 2004, warga umumnya berangapan gelombang tsunami didahului surutnya laut. Surutnya air laut memicu banyak korban karena orang tergoда mencari ikan di pantai yang mengering.

Namun, tak semua tsunami didahului surutnya lautan. Wi-

Jenis-jenis Gempa yang Terjadi di Bawah Laut

Tsunami yang dipicu gempa bumi di bawah laut

Walaupun berada di hadapan lempeng bumi yang menyusup ke bawah akan mengalami surut dulu lautnya setelah gempa [gelombang -], seperti terjadi di pesisir Aceh tahun 2004, sebelum kemudian naik tinggi [gelombang +]. Sebaliknya, daerah di hadapan lempeng yang bergerak ke atas, gelombangnya langsung naik. Periode surut air ini menandakan periode gelombang yang dipengaruhi terutama oleh ukuran geometrik sumber [panjang lebar sumber patahan yang terlepas saat gempa]. Semakin lama dan jauh surutnya, tsunami akan makin besar.



Tsunami yang dipicu longsor ke atau di bawah laut

Longsor ini bisa dipicu oleh aktivitas tektonik berupa gempa bumi atau aktivitas gunung api, ataupun kegagalan struktur. Pada umumnya, tsunami yang ditimbulkannya akan didahului oleh surutnya air, tetapi periodenya relatif pendek. Sumber longsor yang dekat pesisir bisa sangat mematikan. Tsunami akibat longsor juga bisa sangat tinggi, tetapi bersifat lokal. Fenomena ini diduga terjadi di Ambon dan Seram saat tsunami tahun 1674 dan 1899.



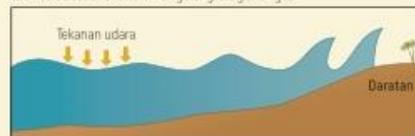
Tsunami karena meteor

Secara teoretis, jatuhnya meteor ke laut juga bisa menimbulkan tsunami. Namun, hal ini belum pernah tercatat dalam sejarah peradaban manusia. Jatuhnya meteor terbesar di masa lalu, sekitar 65 juta tahun lalu, diduga menjadi penyebab pemusnahan massal dan mengakhiri periode Cretaceous dalam sejarah evolusi Bumi.



Tsunami karena meteorologi

Tsunami dipicu oleh gangguan terhadap tekanan udara/atmosfer yang ada di atas permukaan laut/samudra. Ketika gelombang udara ini bertemu dengan gelombang air laut yang memiliki kecepatan aliran sama, pada titik itu terjadilah resonansi gelombang sehingga gelombang udara menyatu dengan gelombang air laut, bergerak secara bersamaan dan seolah mendorong gelombang air ke daratan. Fenomena meteotsunami beberapa kali terjadi di Laut Adriatik. Fenomena serupa juga pernah terjadi di Teluk Nagasaki, Jepang, pada tahun 1979 yang memicu gelombang setinggi 5 meter dan di New Jersey pada tahun 2013. Fenomena ini tergolong sangat langka.



Sumber: Wikipedia (BPP) dan Ahmad Arif

layah di hadapan lempeng bumi yang menyusup ke bawah akan mengalami surut dulu lautnya setelah gempa (gelombang -), seperti terjadi di pesisir Aceh pada 2004, sebelum lalu naik tinggi (gelombang +). Sebaliknya, daerah di hadapan lempeng bergerak ke atas seperti India saat tsunami 2004, gelombangnya langsung naik.

Laut tidak surut

Tidak surutnya laut juga terjadi di Prigi, Jawa Timur, saat tsunami pada 2006, padahal di Cilacap, Jawa Tengah, kejadian sama diawali air laut surut sampai 100 meter.

"Di Cilacap tahun 2006, banyak korban karena berebut mencari kerang bambu saat laut surut. Di Prigi, gelombang naik karena ada refleksi," kata ahli tsunami Badan Pengkajian dan

Penerapan Teknologi, Widodo.

Kajian ahli gempa Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Danny Hilman Natawidjaja (2012), menyebut, tsunami yang berpotensi melanda Padang, Sumatera Barat, kemungkinan tak didahului surutnya laut. Sebab, menurut pemodelan, saat gempa, hampir semua dasar perairan di barat Padang terangkat sehingga gelombang tsunami "positif" atau naik.

Oleh karena itu, warga harus segera mengungsi ke tempat tinggi begitu ada gempa kuat lebih dari satu menit. Warga diimbau tak menanti peringatan dini tsunami. "Setelah gempa besar, segera mengungsi agar tak kehilangan waktu menyelamatkan diri," kata Danny.

Dalam tsunami di Palu, 28 September 2018, tsunami bisa

datang amat cepat, sekitar 4 menit setelah gempa. Korban selamat dalam tsunami di Palu rata-rata menjauh dari pantai saat gempa. Tsunami di Palu tak diawali surutnya laut atau terjadi amat cepat.

Tak ada gempa

Jadi, gempa harus menjadi alarm bahaya agar menjauh dari pantai. Namun, kadang tsunami besar tak didahului gempa besar, misalnya tsunami Mentawai tahun 2010 dan tsunami Pangandaran pada 2006. Fenomena yang disebut tsunami earthquake itu terjadi karena formasi gunung bawah laut terbenam di zona subduksi. Karakter guncangan tsunami earthquake tak kuat, tetapi mengalun lama.

Selain itu, ada tsunami kiriman dari sumber amat jauh atau disebut orphan tsunami, seperti

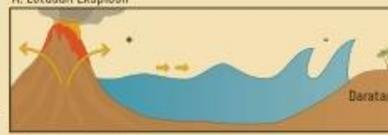
terjadi di Jayapura yang mendapat kiriman tsunami Jepang tahun 2011 dan menewaskan satu orang. Riset Gordon N Joku (2007) setelah tsunami Aitape pada 1998 menemukan warga di Teluk Papua, pernah dilanda tsunami kiriman pada 1941, 1952, 1957, dan 1960.

Tsunami kiriman itu hanya bisa dideteksi lewat pemantauan global. Kini di dunia ada Pusat Peringatan Tsunami Pasifik (Pacific Tsunami Warning Center) untuk memantau tsunami di Samudra Pasifik dan Kelompok Koordinasi Antarpemerintah untuk Sistem Mitigasi dan Peringatan Tsunami Samudra Hindia (The Intergovernmental Coordination Group for the Indian Ocean Tsunami Warning and Mitigation System) untuk Samudra Hindia, di mana Indonesia terlibat di dalamnya.

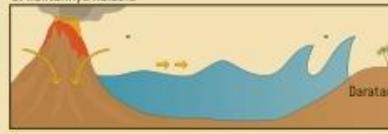
Tsunami karena aktivitas gunung api

Gunung api bisa menyebabkan tsunami dengan berbagai mekanisme, yaitu letusan eksplosif, runtuhnya kaldera, runtuhnya lereng gunung, dan aliran panas. Tsunami yang dipicu Anak Krakatau pada 22 September 2018 diduga disebabkan oleh runtuhnya lereng gunung ini. Sementara, tsunami 1883 diduga terutama disebabkan oleh runtuhnya kaldera Krakatau. Di antara mekanisme ini, hanya runtuhnya kaldera yang didahului oleh surutnya air laut.

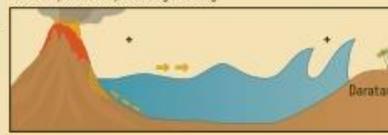
A. Letusan Eksplosif



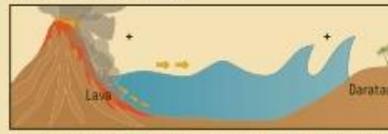
B. Runtuhnya Kaldera



C. Flank/Runtuhnya Lereng Gunung



D. Piroklastik Aliran Awan Panas



• Letusan eksplosif dan flank terjadi bersamaan → letusan kompleks
• Tsunami juga dapat terjadi dari kombinasi diantara keempat aktivitas dari gunung berapi.

INFOGRAFI: XINGBUWATI

Judul	Lahan Masih Jadi Kendala	Tanggal	Kamis, 27 Desember 2018
Media	Kompas (Halaman, 14)		
Resume	Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dibangun untuk mengatasi banjir di Jakarta. Namun, pembangunannya terkendala pembebasan lahan. Pemerintah mengupayakan pembebasan lahan untuk pembangunan Bendungan Ciawi dan Sukamahi segera tuntas.		



KRISTI DWI UTAMI

Suasana proyek pembangunan Bendungan Ciawi di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/12/2018). Bendungan yang mereduksi 30,6 persen debit air yang mengalir ke Sungai Ciliwung ini dibangun untuk mengatasi banjir di Jakarta dari hulu.

Lahan Masih Jadi Kendala

Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dibangun untuk mengatasi banjir di Jakarta. Namun, pembangunannya terkendala pembebasan lahan.

BOGOR, KOMPAS — Pemerintah mengupayakan pembebasan lahan untuk pembangunan Bendungan Ciawi dan Sukamahi segera tuntas. Selanjutnya, pembangunan dua bendungan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, itu bisa selesai pada akhir 2019.

Pembangunan Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, molor dari rencana semula, terkendala pembebasan lahan.

Sejak dimulai pada akhir 2017, pembangunan konstruksi Bendungan Ciawi sekitar 9 persen, sedangkan Sukamahi 12 persen. Saat ini, pembebasan lahan di sekitar Bendungan Ciawi sekitar 35 persen dan di sekitar Bendungan Sukamahi 50 persen.

Presiden Joko Widodo optimistis persoalan pembebasan la-

han bisa diselesaikan pada Januari 2019.

"Pembangunan dua bendungan ini merupakan salah satu upaya mengatasi banjir Jakarta dari hulu," kata Presiden Joko Widodo sesuai meninjau pembangunan Bendungan Sukamahi, Rabu (26/12/2018).

Dua bendungan tersebut masuk dalam rencana strategis pemerintah membangun 65 bendungan pada 2014-2019. Bendungan tersebut dibangun untuk mengendalikan daya rusak air dan mengatasi banjir.

Bendungan Ciawi dan Sukamahi berfungsi menahan aliran air dari Gunung Gede dan Gunung Pangrango sebelum tiba di Bendung Katulampa yang selanjutnya mengalir ke Sungai Ciliwung. Keberadaan dua bendung-

an ini bisa menampung air hujan dan menahan aliran air di wilayah Bogor sehingga tiba di Jakarta lebih lambat 2-4 jam daripada sebelum ada bendungan.

Presiden Joko Widodo menambahkan, antisipasi banjir dari hilir juga harus dilakukan untuk mengoptimalkan upaya di hulu. "Upaya antisipasi banjir di hilir dapat dilakukan dengan pembangunan sumur resapan dan pemberihan saluran air juga dilakukan untuk mengurangi banjir lebih banyak lagi," katanya.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hari Suprayogi mengakui, masalah pembebasan lahan

antara lain terkait status tanah. "Itu harus tuntas dulu, baru bisa proses pembebasan lahan dan pembayaran ganti rugi," ujarnya.

Suprayogi menambahkan, dari hasil koordinasi Menteri PUPR dan Menteri Keuangan, disepakati pembayaran pembebasan lahan bisa memakai APBN.

Sarwo (52), warga Cibogo, Megamendung, Bogor, mengatakan, ada proses pembayaran ganti rugi pembebasan lahan yang cepat, tetapi ada juga yang lambat. "Lama atau tidaknya proses pembayaran ganti rugi tergantung dari sertifikat tanahnya bermasalah atau tidak," katanya.

Menurut Sarwo, pembangunan bendungan akan berdampak positif bagi masyarakat di sekitar bendungan dan masyarakat Jakarta. "Bendungan bisa menarik

wisatawan. Lebih lagi, banjir di Jakarta juga bisa dikurangi," kata Sarwo.

Daya tampung

Menurut Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Bambang Hidayah, ke dua bendungan tersebut secara keseluruhan berdaya tampung sekitar 8 juta meter kubik.

Keberadaan Bendungan Ciawi mengurangi debit air yang mengalir ke Jakarta sekitar 30,6 persen. Adapun Bendungan Sukamahi mengurangi 27,4 persen debit air.

Sebagian lahan di lokasi Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi sudah dibersihkan. Masyarakat yang semula menghuni wilayah itu direlokasi ke tempat lain. (E18)

Judul	9 Proyek Dilelang Tahun Depan	Tanggal	Kamis, 27 Desember 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 3)		
Resume	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana melelang sembilan proyek bendungan pada 2019, menyusul 13 proyek serupa yang dilelang tahun ini.		

9 Proyek Dilelang Tahun Depan

BOGOR — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana melelang sembilan proyek bendungan pada 2019, menyusul 13 proyek serupa yang dilelang tahun ini.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Hari Suprayogi mengatakan lelang proyek pembangunan bendungan merupakan bagian dari program pembangunan 65 bendungan dalam periode 2015—2019. Dari jumlah tersebut, pemerintah akan membangun 49 bendungan baru dan 16 bendungan lanjutan.

"Beberapa yang akan dilelang, Pelosika, Riam Kiwa, di Papua juga ada. Yang mana dulu [proyek yang dilelang] tergantung kesiapannya," ujarnya di lokasi pembangunan Bendungan Ciawi, Rabu (26/12).

Sebelumnya, Yogi mengatakan pembangunan bendungan baru akan meningkatkan rasio jumlah air yang ditampung dengan jumlah penduduk menjadi 120 meter kubik per kapita pada 2030. Saat ini, rasio tersebut baru mencapai 50 meter kubik per tahun. Dengan kata lain, pembangunan bendungan bendungan baru bakal meningkatkan rasio hingga 140%.

Dalam catatan *Bisnis*, Bendungan Pelosika (Sulawesi Tenggara) dan Riam Kiwa (Kalimantan Selatan) merupakan dua dari empat bendungan yang ditawarkan pemerintah untuk dibangun dengan pinjaman dari Pemerintah China.

Dua bendungan lain adalah Jenelata (Sulawesi Selatan) dan Lambakan (Kalimantan Timur).

Pelosika dirancang dengan kapasitas daya tampung sebesar 800 juta meter kubik sedangkan Riam Kiwa sebesar 127 juta meter kubik. Debit air dari masing-masing ben-

dungan bisa dimanfaatkan untuk sumber air irigasi seluas 23.000 hektare dan 5.000 hektare.

Kementerian PUPR telah melelang 13 proyek bendungan baru dengan total nilai proyek sekitar Rp24,3 triliun. Dari jumlah tersebut, enam kontrak bendungan senilai Rp12,2 triliun sudah diteken. Sisanya masih dalam tahap pelelangan.

Pada perkembangan lain, Kementerian PUPR menargetkan penyelesaian Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi di Bogor pada akhir 2019. Keduanya merupakan bendungan kering yang dibangun di kawasan hulu untuk mengendalikan banjir di hilir.

Yogi mengatakan progres konstruksi masing-masing bendungan per 26 Desember 2018 sebesar 9,22% dan 13,76%.

"Dibandingkan dengan rencana, ini memang ada deviasi karena masalah lahan." *(Riki Maulana)*

TARIF BARU BERLANGGANAN BISNIS INDONESIA

Para pembaca dan mitra terbaik Harian Bisnis Indonesia.

Terima kasih atas kepercayaan dan hubungan baik selama ini. Telah menjadi komitmen kami untuk selalu memberikan yang terbaik dalam melayani pembaca dan mitra kami. Dalam rangka menjaga kualitas layanan, kami menginformasikan per 1 Januari 2019 harga eceran dan berlangganan menjadi sbb :

Wilayah	Harga Eceran	Harga Langganan
Sumatra, Jawa, Bali, NTT, NTB	Rp 11.000	Rp 250.000
Kalimantan, Sulawesi dan Kawasan Timur Indonesia	Rp 12.000	Rp 325.000

Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi Customer Relation Officer kami di 57901023 ext 520, atau 5791031 (direct), SMS/WA ke 08871811.010 (Ryan) email : cs3@bisnis.com.

Anda juga bisa menghubungi kantor Perwakilan Bisnis Indonesia atau agen Koran terdekat.

Terimakasih

PENERBIT

Judul	Tantangan Berat Industri Pariwisata	Tanggal	Kamis, 27 Desember 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 2)		
Resume	Kinerja industri pariwisata pada tahun ini mendapat tantangan berat. Berbagai bencana alam dan tragedi bom yang terjadi di beberapa wilayah mempengaruhi secara langsung jumlah wisatawan. Kementerian pariwisata bahkan pesimistis tahun ini target kunjungan tercapai.		

EDITORIAL

Tantangan Berat Industri Pariwisata

Kinerja industri pariwisata pada tahun ini mendapat tantangan berat. Berbagai bencana alam dan tragedi bom yang terjadi di beberapa wilayah mempengaruhi secara langsung jumlah wisatawan. Kementerian Pariwisata bahkan pesimistis tahun ini target kunjungan tercapai.

Sebagaimana kita ketahui, sepanjang 2018 terdapat tiga bencana besar di tiga lokasi berbeda di Tanah Air yaitu di pertengahan tahun gempa meluluhlantakkan Lombok. Peristiwa tersebut juga menyebabkan 17 negara mengeluarkan *travel advice* atau imbauan agar sementara waktu tidak melakukan kunjungan ke daerah itu.

Selanjutnya tsunami di Donggala-Palu, dan terakhir erupsi Gunung Anak Krakatau yang menyebabkan tsunami di Selat Sunda. Tak hanya bencana, tragedi bom bunuh diri yang dilakukan satu keluarga di Surabaya juga ikut menggoyahkan industri pariwisata.

Dari data yang disampaikan oleh Kementerian Pariwisata, jumlah kunjungan diperkirakan hanya mencapai 16 juta lebih rendah dari harapan semula yang dipatok pada awal tahun yaitu 17 juta kunjungan.

Meski demikian, Kementerian Pariwisata tetap berkeyakinan nilai devisa yang dicapai sesuai dengan yang diperkirakan yaitu US\$17,6 miliar. Alasannya, dari laporan yang diterima, rata-rata setiap kunjungan melakukan *spending* atau *average spending per arrival* senilai US\$1.100.

Besarnya pendapatan dari sektor ini ditopang oleh tiga agenda internasional yaitu Asian Games kemudian dilanjutkan dengan Asian Para Games, dan rapat tahunan IMF-World Bank. Hingga Oktober saja, jumlah devisa yang diperoleh sudah mencapai US\$14,56 miliar.

Tantangan agaknya masih berlanjutnya sampai dengan tahun depan bahkan diperkirakan lebih berat dari tahun ini mengingat minimnya agenda berskala internasional yang mampu menjadi magnet para pelancong. Di sisi lain, pemulihan bencana di beberapa wilayah masih belum 100%.

Kita tentunya tidak bisa menyalahkan bencana, yang harus dilakukan adalah menghadapi dan bangkit dari kondisi saat ini. Pemerintah baik pusat maupun daerah bersama seluruh pihak terkait harus bersama-sama membangun industri ini agar berjalan

sebagaimana yang diharapkan.

Para pelaku tentunya mengharapkan ada langkah konkret dari pemerintah guna meningkatkan jumlah kunjungan. Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah, *pertama*, bagaimana menggiatkan mitigasi bencana ke masyarakat luas.

Pentingnya mitigasi bencana bagi masyarakat dapat dilihat dari saat terjadi bencana gempa yang besar di Kobe, Jepang, pada 1995, yang tercatat jumlah penduduk yang selamat mencapai 95%. Di Jepang pula kita bisa mendapatkan jumlah kunjungan wisata yang relatif stabil setiap tahunnya meski gempa kerap terjadi.

Kedua, mempersiapkan infrastruktur ke lokasi wisata. Kemudahan akses menuju lokasi yang diikuti dengan ongkos transportasi dan penginapan yang bersaing tentunya sangat diharapkan.

Ketiga adalah memberikan kemudahan perpajakan. Beberapa usulan seperti aturan pembaruan mengenai pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau *value added tax (VAT) refund* bagi turis yang berbelanja di dalam negeri agar segera dikeluarkan. Tujuan revisi perpajakan itu adalah guna meningkatkan *spending* wis-

man mengingat untuk mencapai penerimaan sebesar US\$20 miliar maka dibutuhkan belanja dari tiap kunjungan rata-rata US\$1.500.

Harus diakui persyaratan untuk mendapatkan fasilitas *VAT refund* untuk turis di Indonesia tergolong tidak kompetitif dibandingkan dengan negara tetangga. Aturan yang berlaku sejak 2010 adalah pemotongan pajak sebesar 10%, sementara batasan untuk mendapatkan *VAT refund* adalah transaksi minimal Rp5 juta padahal di Singapura batasannya minimal US\$100 atau sekitar Rp1 juta.

Keempat, meningkatkan promosi pariwisata ke berbagai negara baik melalui media iklan ataupun melalui perwakilan duta besar Indonesia yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Pemerintah juga harus giat menarik wisatawan baru dari berbagai negara di belahan dunia terutama generasi milenial yang memang sangat menyukai *traveling*.

Tak mudah mencapai target 20 juta kunjungan di tengah kondisi saat ini. Untuk itu, dibutuhkan langkah nyata dari pemerintah untuk kembali meningkatkan kinerja bidang usaha yang dinilai paling cepat mendatangkan devisa negara ini. 

Judul	Berita Foto	Tanggal	Kamis, 27 Desember 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)		
Resume	Bendungan Sukamahi		

► **BENDUNGAN SUKAMAHI**



Antara/Wahyu Purno A

Presiden Joko Widodo (*kiri*) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (*kedua kiri*), dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (*tengah*) meninjau pembangunan Bendungan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/12). Pembangunan

Bendungan Sukamahi yang memiliki volume tampung 1,68 juta meter kubik serta Bendungan Ciawi sebesar 6,45 juta meter kubik tersebut diharapkan dapat mencegah banjir kiriman ke Ibu Kota yang berasal dari Bogor dan ditargetkan selesai pada 2019.

Judul	Pengembang Masih Menunggu Insentif	Tanggal	Kamis, 27 Desember 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 20)		
Resume	Gedung berkonsep ramah lingkungan atau green building mutlak dikembangkan sejalan dengan populasi kota yang semakin padat. Namun, konsep bangunan hijau masih belum banyak diterapkan pada pembangunan gedung tanah air.		

Pengembang Masih Menunggu Insentif

JAKARTA — Gedung berkonsep ramah lingkungan atau *green building* mutlak dikembangkan sejalan dengan populasi kota yang semakin padat. Namun, konsep bangunan hijau masih belum banyak diterapkan pada pembangunan gedung di Tanah Air.

Indonesia Green Building Program Leader International Finance Corporation Sandra Pranoto mengatakan bahwa dukungan pemerintah masih belum menyeluruh sehingga diperlukan insentif khusus bagi pengembang.

"Insentif sangat diharapkan pengembang, peraturan wali kota di Bandung sebenarnya sudah menyebutkan insentif tersebut, tetapi belum diterapkan sehingga developer masih menunggu langkah pemerintah kota untuk menerapkan itu," katanya kepada *Bisnis*, Senin

(24/12).

Insentif yang dikeluarkan melalui peraturan Wali Kota Bandung antara lain disebutkan bahwa apabila sudah memenuhi persyaratan bangunan hijau, pengembang berhak mendapatkan izin mendirikan bangunan.

Selain itu, apabila persyaratan terpenuhi dari yang seharusnya, ada dua jenis insentif yang bakal diperoleh pengembang, yaitu penambahan luasan lantai atau pemotongan pajak bumi dan bangunan.

Sandra menjelaskan bahwa insentif bangunan berkonsep ramah lingkungan yang dikeluarkan oleh Wali Kota Bandung merupakan yang pertama di Indonesia sehingga dirinya mengharapkan Jakarta bisa segera mengikuti peraturan tersebut.

Selain itu, kata Sandra, tidak adanya pendanaan ikut menghambat pembangunan

bangunan hijau.

Dengan dikeluarkannya peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Keuangan Berkelanjutan pada 2017, hal itu turut mendorong perbankan untuk lebih aktif dalam memberi pendanaan dalam proyek-proyek ramah lingkungan.

Hingga saat ini, belum banyak perbankan yang mengeluarkan *green bond* untuk pembiayaan proyek-proyek hijau. OCBC NISP Bank adalah bank swasta pertama yang mengeluarkan *green bond* untuk bangunan hijau.

"Diharapkan banyak bank lainnya akan mengikuti sehingga dengan pilihan pendanaan yang beragam untuk bangunan hijau, baik untuk developer maupun pemilik rumah, akan lebih banyak lagi bangunan hijau di Indonesia," tutur Sandra.

Peraturan mengenai bangunan hijau pun baru ada di dua kota,

Jakarta dan Bandung. Kedua kota tersebut telah memiliki kebijakan daerah yang bersifat wajib tentang bangunan hijau.

Tak hanya itu, pengertian terhadap bangunan hijau dan perangkat bantu yang tersedia masih kurang. Masyarakat masih menganggap pengembangan bangunan hijau itu mahal dan sulit, serta memakan waktu.

Pada kenyataannya, kata Sandra, walaupun pada banyak kasus memang terjadi penambahan biaya, hal itu biaya bisa ditekan seminimum mungkin. Dan terpenting, imbas dari penerapan bangunan hijau dapat menekan biaya operasional, terutama untuk pembayaran tagihan listrik dan air menjadi seminimum mungkin.

"*Green building* membutuhkan *minimum efforts*, tetapi menghasilkan *maximum impacts*." (*Marla Elena*)

Judul	Jasa Marga Incar Ruas Bontang - Samarinda	Tanggal	Kamis, 27 Desember 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 20)		
Resume	PT. Jasa Marga Tbk. Siap berpartisipasi dalam tender perusahaan jalan tol Bontang-Samarinda setelah mendapat hak perusahaan tol Balikpapan-Samarinda lewat anak usahanya, PT Jasamarga Balikpapan Samarinda.		

Jasa Marga Incar Ruas Bontang–Samarinda

JAKARTA — PT Jasa Marga (Persero) Tbk. siap berpartisipasi dalam tender perusahaan jalan tol Bontang–Samarinda setelah mendapat hak perusahaan tol Balikpapan–Samarinda lewat anak usahanya, PT Jasamarga Balikpapan Samarinda.

Direktur Utama PT Jasamarga Balikpapan Samarinda S.T.H. Saragi mengatakan bahwa ruas Bontang–Samarinda merupakan bagian bagian dari proyek jalan tol Bontang–Samarinda–Balikpapan yang diinisiasi oleh pemerintah.

Saat ini, Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat baru membuka tender perusahaan ruas Balikpapan–Samarinda sepanjang 99,35 kilometer.

“Kalau ada tender lagi, kami bisa saja ikut, tetapi itu tergantung pada pusat [induk]. Di Palaran kami sudah buat simpang susunnya. Jadi, ketika mau disambung ke Bontang ya, tinggal *nyambungin*,” ujarnya, pekan lalu.

Berdasarkan informasi dari laman Badan Pengatur Jalan Tol, ruas Bontang–Samarinda sejauh 94 kilometer masuk dalam daftar ruas yang dalam persiapan tender. Total investasi untuk ruas tersebut mencapai Rp13,40 triliun.

Saat ini, jarak Bontang ke Samarinda terpaut 120 kilometer melalui jalan nasional. Apabila trase yang ditetapkan 94 kilometer, jalan tol memangkas jarak hingga 26 kilometer.

Dia memperkirakan bahwa ruas tol Bontang–Samarinda bakal diminati kalangan investor.

Pasalnya, menurut Saragi, bidang usaha jalan tol kini mulai diminati

para pemain baru, tidak lagi didominasi badan usaha milik negara. Oleh karena itu, dia menyebutkan bahwa persaingan dalam lelang bakal cukup ketat.

Berdasarkan catatan *Bisnis*, per September 2018, kepemilikan swasta di perusahaan jalan tol cukup signifikan.

KEPEMILIKAN SWASTA

Sedikitnya, ada 13 jalan tol yang dimiliki swasta dengan porsi kepemilikan di atas 25%. Panjang ruas tol tercatat 416,62 kilometer atau 35% dari total panjang 44 ruas tol yang beroperasi sejauh 1.172 kilometer.

Di sisi lain, PT Jasamarga Balikpapan Samarinda berencana membuka operasional jalan tol Balikpapan–Samarinda pada April 2019.

Jalan tol yang beroperasi merupakan tiga seksi yang digarap oleh perusahaan, sedangkan dua seksi lainnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Menurut Saragi, target operasi jalan tol lebih cepat dari tenggat yang dijanjikan dalam perjanjian perusahaan jalan tol (PPJT).

“Di PPJT, kami harus selesai pada Juli 2019. Kalau seksi pemerintah bisa mengejar, kami akan operasikan semua [seksi],” ujarnya.

Secara keseluruhan, progres pembebasan lahan pada proyek jalan tol Balikpapan–Samarinda saat ini mencapai 98,40% dan diharapkan bisa rampung seluruhnya paling lambat pada pekan pertama Januari 2019, sedangkan progres fisik jalan tol tersebut telah mencapai 77,25%.

(Rivki Maulana)